DAFTAR PUSTAKA

Buku

Asikin, Zainal. *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012.

Asshiddiqie, Jimly. *Penegakan Hukum*. Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2006.

Asshiddiqie, Jimly. Perihal Undang-Undang. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Asyhadie, Zaeni. Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015.

Asyhadie, Zaeni. *Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Damanik, Sehat. Hukum Acara Peradilan Hubungan Industrial. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Dunn, William N. Pengantar Analisis Kebijakan Publik (Edisi Kedua). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2003.

Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.

El Muhtaj, Madja. Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia. Jakarta: Kencana, 2015.

Hadjon, Philipus M. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987.

Hadjon, Philipus M., dkk. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011.

Husni, Lalu. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.

Husni, Lalu. Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (Edisi Revisi). Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.

Husni, Lalu. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Pengadilan & Di Luar Pengadilan. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Marbun, S.F. Peradilan Tata Usaha Negara. Yogyakarta: Liberty, 2003.

Muchsan. Hukum Administrasi Negara dan Peradilan Administrasi Negara di Indonesia. Yogyakarta: Liberty, 2015.

Muchsan. Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara. Yogyakarta: Liberty, 2004.

Imam Soepomo. Pengantar Hukum Perburuhan / Pengantar Hukum Ketenagakerjaan (Edisi Revisi). Jakarta: Djambatan, 2003.

Posner, Richard A. Economic Analysis of Law (8th Edition). New York: Aspen Publishers, 2011.

Prasetya, Rudhi. Kedudukan Mandiri dan Pertanggungjawaban Terbatas dari Perusahaan. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.

Prasetyo, Teguh. Keadilan Bermartabat: Perspektif Teori Hukum. Nusa Media, 2015.

Ridwan HR. Hukum Administrasi Negara (Edisi Revisi). Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Ridwan HR. Hukum Administrasi Negara (Edisi Revisi). Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Sembiring, Sentosa. Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas. Bandung: CV Nuansa Aulia, 2012.

Situmorang, Victor M. dan Jusuf Juhir. Aspek Hukum Pengawasan Melekat

dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.

Sjahdeini, Sutan Remy. Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan. Jakarta: Kencana, 2016.

Soekanto, Soerjono. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.

Soepomo, Imam. Pengantar Hukum Perburuhan. Jakarta: Djambatan, 2003.

Soepomo, Iman. *Pengantar Hukum Perburuhan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Soeprapto, Maria Farida Indrati. Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan. Yogyakarta: Kanisius, 2007.

Sutedi, Adrian. *Hukum Perburuhan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Uwiyono, Aloysius, dkk. Asas-Asas Hukum Perburuhan. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.

Wijayanti, Asri. Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Wijayanti, Asri. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Sumber Fiqih dan Hukum Islam

Al-Bukhari, Al-Imam Abu Abdillah. Shahih Al-Bukhari, Kitab al-Hawalat, Bab Fi al-Hawalahwa Hal Yarji'u Fi al-Hawalah. Beirut: Dar Ibnu Katsir, 2002.

Asy-Syatibi. Al-Muwafaqat fi Ushul asy-Syari'ah, Jilid 2. Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 2004.

Az-Zuhaili, Wahbah. Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, Jilid 5. Beirut: Dar al-

Fikr, 2011.

Ibnu Majah, Al-Imam Abu Abdillah. Sunan Ibnu Majah, Kitab al-Ruhun, Bab Ajru al-Ujara'. Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, 1997.

Sabiq, Sayyid. Fiqhus Sunnah, Jilid 3. Kairo: Dar al-Fath, 2000.

Peraturan Perundang-undangan dan Putusan Pengadilan

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 67/PUU-XI/2013 tentang Pengujian

Organisasi Perburuhan Internasional (ILO). Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan: Panduan untuk Pengelola. Jenewa: Kantor Perburuhan Internasional, 2011.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2003 tentang Pengesahan ILO Convention No. 81 Concerning Labour Inspection in Industry and Commerce.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang

Pengupahan.

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Republik Indonesia. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan.

Website

Arkan. "Jeritan Pilu Buruh di Jogja: Dari Tiga Bulan Tak Digaji, Terjerat Pinjol, Hingga BPJS Mati". *Suara Jogja. 31 Maret 2026.*

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Laporan Tahunan Kinerja Pengawasan Ketenagakerjaan Provinsi DIY Tahun 2025*. Yogyakarta: Disnakertrans DIY, 2026.

Humas Polda DIY. "Keterangan Pers: Koordinasi Lintas Sektoral Penanganan Dugaan Tindak Pidana Ketenagakerjaan di Wilayah Yogyakarta". Diakses dari https://jogja.polri.go.id/ pada tanggal 10

April 2026.

Radar Jogja. “Nasib Buruh CV Evergreen Tak Digaji, Sakit Bayar Sendiri, Disnakertrans DIY Sebut Perusahaan Lakukan Tindak Pidana”. *Jawapos.com*. Diakses pada 8 April 2026.

Wawancara

Ningrum, Diah Swastika. Wawancara Pribadi. Disnakertrans DIY, 20 Mei 2026.

Wibawa, Novendy Setiya. Wawancara Pribadi. Disnakertrans DIY, 20 Mei 2026.